



MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA



2021

Dokumen Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada



**DOKUMEN PENYELARASAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN
TINGGI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Nama Ketua Tim : Dr. Ratminto, M. Pol. Admin

NIP/NIDN : 21086602

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN
2021**

Dokumen Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada



	MIAP – DMKP FISIPOL UGM Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta	Nomor:
	DOKUMEN KURIKULUM	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus				
Pemeriksa				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAGIAN I IDENTITAS PROGRAM STUDI.....	1
BAGIAN II EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY	1
2.1 Evaluasi Kurikulum	1
2.2 <i>Tracer Study</i>	17
BAGIAN III LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	1
3.1 Nilai-Nilai Dasar Universitas Gadjah Mada	1
3.2 Landasan	1
3.3 Landasan Hukum.....	2
BAGIAN IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN <i>UNIVERSITY VALUE</i>	3
4.1 Visi, Misi, dan Tujuan UGM	3
4.2 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Fakultas	3
4.3 Visi , Misi dan Tujuan Departemen	4
4.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi.....	5
BAGIAN V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	6
5.1 Tujuan Pendidikan MIAP DMKP Fisipol UGM.....	6
5.2 Profil Lulusan	6
5.3 Perumusan CPL	8
BAGIAN VI PENETAPAN BAHAN KAJIAN.....	11
6.1 Gambaran <i>Body of Knowledge</i> (BoK).....	11
6.2 Deskripsi Bahan Kajian	11
6.3 Bahan Kajian, Mata Kuliah, dan CPL.....	14
BAGIAN VII PEMBENTUKAN MATAKULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS	22
BAGIAN VIII MATRIKS DAN PETA KURIKULUM.....	24



BAGIAN IX RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	27
BAGIAN X MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM	30



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tema dan Mata Kuliah Bidang Administrasi Publik	13
Tabel 2. Profil Lulusan dan Deskripsinya	30
Tabel 3. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sesuai SN Dikti	31
Tabel 4. Cakupan Kompetensi CPL berdasarkan Parameter KKNi	32
Tabel 5 Bahan Kajian (BK)	34
Tabel 6. Bahan Kajian, Mata Kuliah dan CPMK	45
Tabel 7. Matrik CPL dan Mata Kuliah Baru	47
Tabel 8. Sebaran Mata Kuliah	48
Tabel 9. Daftar Mata Kuliah Konsentrasi	48
Tabel 10. Daftar Mata Kuliah Pilihan	49
Tabel 11. Daftar Softskill yang Ditawarkan	50
Tabel 12. Format Rencana Pembelajaran Semester	52
Tabel 13. Tabel Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (RPKM)	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Body of Knowledge	34
----------------------------------	----



KATA PENGANTAR

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1). Pentingnya kurikulum bagi terselenggaranya pendidikan dan pencapaian outcome dari pendidikan tinggi, maka proses penyusunan kurikulum harus melalui berbagai tahapan sebagaimana diatur dalam panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. (Direktorat Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, 2020).

Penyusunan kurikulum harus menganut prinsip terbuka, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat. Tuntutan pada kualitas pendidikan menjadikan kurikulum harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kurikulum MIAP DMKP Fisipol pada dasarnya merupakan kurikulum yang mulai dijalankan tahun 2022. Tahun 2023 kementerian Pendidikan merilis Permendikbud No. 53 Tahun 2023, yang mengharuskan dilakukannya penyelarasan atas kurikulum yang mulai dijalankan. Berdasar identifikasi perkembangan lingkungan dan permasalahan yang ditemukan, penyesuaian dilakukan pada beberapa aspek berikut: (1). Penyesuaian jumlah SKS yang harus diselesaikan (2). Menghapus mata kuliah yang kurang relevan digantikan dengan mata kuliah yang lebih relevan. (3). Memberikan beban SKS kepada kegiatan Matrikulasi.

Dokumen ini terdiri dari 10 poin isi dari 11 poin yang diwajibkan dalam panduan penyusunan kurikulum. Point yang tidak disajikan adalah poin mengenai rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar Prodi. Poin ini kurang relevan untuk prodi S2 yang kuliahnya dirancang hanya 3 atau 4 semester.

Demikian pengantar penyesuaian penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik, Departemen Manajemen Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Yogyakarta, Agustus 2021

Tim Penyusun Penyesuaian Kurikulum

**BAGIAN I IDENTITAS PROGRAM STUDI**

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Gadjah Mada
2	Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3	Departemen	Manajemen Kebijakan Publik
4	Program Studi	Magister Ilmu Administrasi publik
5	Status Akreditasi	A
6	Gelar Lulusan	<i>Master of Public Administration</i>
7	Visi	Menjadi institusi unggul/terkemuka (<i>center of excellent</i>) di dalam pengembangan pemimpin yang berkarakter.
8	Misi	1. Mengembangkan pemimpin yang memahami dan peka terhadap konteks menuju masyarakat berkelanjutan. 2. Mengembangkan keahlian multidisiplin berbasis kajian yang mendalam. 3. Berkontribusi pada penyelesaian masalah publik melalui kolaborasi.
9	Alamat Prodi	Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta 55281
10	Telp/Fax	Telp: +62 (274) 563825, 588234 Fax: +62 (274) 589655
11	Web Prodi	www.map.ugm.ac.id



BAGIAN II EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

2.1 Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum dilakukan menggunakan beberapa cara pengumpulan data, diantaranya: (1). Evaluasi terhadap dokumen kinerja internal yang telah tersedia. (2). Diskusi terpumpun yang dilakukan bersama stakeholder, baik mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan. (3). Diskusi dan *benchmarking* dengan lembaga pendidikan lain yang sejenis. (4). *Literature review* atas isu dan topik administrasi publik di berbagai belahan dunia. (5). Diskusi mendalam dengan para pendiri MIAP dan dosen pengampu.

2.1.1 Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif difokuskan pada evaluasi atas desain dan strategi Kuliah beserta hasil yang dicapai. Desain strategi kuliah selama 5 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang terus menerus menyesuaikan kebutuhan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan dinamika desain kuliah itu tidak menghilangkan substansi penting dari kuliah itu sendiri yakni peran dan keterlibatan mahasiswa dalam setiap proses perkuliahan. Keterlibatan itu dapat wujud dalam berbagai bentuk mulai dari membaca buku-buku dan artikel, membuat kajian/review, berdiskusi baik di dalam kelas maupun di luar kelas, membuat tugas tugas sampai pada magang untuk memahami praktik dalam pemerintahan.

Desain yang telah dijalankan tersebut telah menghasilkan lulusan lulusan yang memuaskan pengguna, namun demikian masih teridentifikasi beberapa permasalahan, di antaranya:

a. Kemampuan untuk menulis dengan kaidah penulisan ilmiah relatif masih lemah.

Kaidah penulisan ilmiah memiliki beberapa kriteria yang berbeda dengan penulisan populer. Sebuah karya ilmiah haruslah logis, objektif, sistematis, handal, memiliki desain yang jelas, akumulatif dengan analisis yang jelas. Lemahnya kemampuan menulis dengan kaidah ilmiah disebabkan oleh faktor internal pengelolaan strategi kuliah maupun faktor eksternal dari mahasiswa sendiri. Secara internal keterlibatan mahasiswa dalam setiap proses perkuliahan ternyata belum mampu sepenuhnya untuk menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk menulis tugas akhir (karya ilmiah) secara memadai. Untuk itu dibutuhkan sebuah desain yang memungkinkan partisipasi aktif mahasiswa itu bertransformasi ke



dalam bentuk pemahaman dan skill untuk menulis dengan kaidah ilmiah. Materi materi teknis penulisan ilmiah menjadi salah satu fokus dalam desain kuliah *double track* yang dirancang.

b. Kemampuan untuk menelusuri artikel dalam jurnal ilmiah.

Jurnal ilmiah merupakan sumber penting bagi dunia akademis untuk memahami perkembangan dunia akademik terbaru, baik dalam tataran teori maupun dalam tataran aplikasinya. Saat ini menemukan jurnal ilmiah telah bergeser dari bersifat statis menemukan di katalog perpustakaan, menjadi menemukan jurnal di dunia maya yang memiliki kekayaan data luar biasa. Untuk dapat melakukan akses atas jurnal jurnal itu dibutuhkan keahlian teknis yang cukup. Bagi generasi milenial hal ini bukanlah hambatan bahkan justru menjadi kekuatan tersendiri, namun tidak selalu demikian bagi mahasiswa S2 MIAP. Latar belakang mahasiswa MIAP sebagian besar adalah staf di pemerintah yang secara usia tidak semua bagian dari generasi milenial. Pada sisi lain memang pemerintahan telah menuntut pemanfaatan teknologi, namun keberagaman daerah membuat beragam pula implementasi dari tuntutan teknologi ini, dengan demikian maka kemampuan mahasiswa atas pemanfaatan teknologi ini juga masih sangat beragam. Untuk itu desain kurikulum yang fleksibel dibutuhkan agar kemampuan/skill teknis semacam ini juga dapat diakomodasi.

c. Kemampuan untuk melakukan review/kajian literatur.

Literature review atau dikenal dengan istilah tinjauan pustaka merupakan sebuah analisis berupa pemikiran kritis dari suatu topik khusus yang merupakan bagian dari sebuah keilmuan. Kegiatan *literature review* dimulai dari membaca sejumlah literatur, memahami, mengkritik, dan memberikan ulasan terhadap literatur tersebut. Sumber sumber literatur yang umum dikaji dalam *literature review* antara lain: paper atau artikel ilmiah dari jurnal ilmiah; paper dari konferensi atau seminar yang kemudian dikenal dengan sebutan *prosiding*; tesis dan disertasi; *report* (laporan) dari organisasi yang terpercaya; buku teks. Untuk memperoleh *literature review* yang memadai sebagai dasar untuk penulisan karya ilmiah (khususnya tesis) dibutuhkan *skill* tertentu. Sebagai mahasiswa S2, pada dasarnya mahasiswa telah mempelajari hal ini saat mereka kuliah di S1, namun karena variasi asal mahasiswa yang cukup tinggi, maka kemampuan *literature review* dari mahasiswa cukup beragam. Memberikan bekal keterampilan yang



cukup dalam melakukan *literature review* harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum yang akan datang.

d. Keterampilan praktis yang berkaitan langsung dengan bidang kerja.

Sebagian besar mahasiswa S2 MIAP adalah mahasiswa dengan latar belakang staf pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bergeser ke tahun-tahun belakangan tren mahasiswa S2 MIAP yang berlatar belakang baru lulus (fresh graduate) langsung melanjutkan kuliah S2 jumlahnya terus meningkat. Agar lulusan MIAP mampu memiliki *skill* dan pemecah permasalahan publik sebagaimana visi dan misi yang diemban, maka dibutuhkan keterampilan dan praktik yang sesungguhnya, utamanya di dunia pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu cara agar mahasiswa dapat memahami praktik dan terampil dalam dunia kerja adalah melalui kegiatan magang. Akomodasi berikutnya yang dipertimbangkan dalam kurikulum adalah desain kuliah berbasis kasus. Selain itu pemberian *skill*/materi khusus yang dibutuhkan oleh dunia kerja, utamanya dunia birokrasi juga menjadi bagian tak terpisahkan.

2.1.2 Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif dalam proses penyusunan kurikulum ini dikelompokkan dalam tiga bagian evaluasi sesuai dengan hasil evaluasi formatif yang dilakukan. Bagian pertama adalah evaluasi sumatif berkaitan dengan perkembangan ilmu administrasi publik, bagian kedua adalah *problem-based learning*, dan bagian ketiga adalah peta topik dan materi kuliah bidang administrasi publik di berbagai universitas, yaitu:

a. Perubahan Fokus dan Lokus dalam Ilmu Administrasi Publik Kontemporer.

Ada pepatah kuno yang relevan hingga saat ini, bahwa “tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan.” Dengan kata lain, perubahan adalah sesuatu yang abadi dan tidak bisa kita tolak. Itu mengapa perkembangan ilmu sosial, selalu erat kaitannya dengan berbagai perubahan (Hadiz & Dhakidae, 2005), baik perubahan dari sisi filsafat ontologi (apa itu realitas), epistemologi (bagaimana mendapatkan realitas), dan aksiologi (kegunaan hasil analisis terhadap realitas). Hal yang sama juga berlangsung dalam ilmu administrasi publik, terjadi berbagai perubahan dari



sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun demikian, banyak ilmuwan administrasi publik yang gagap dalam merespon perubahan tersebut, sehingga seperti yang disampaikan Ali Farazmand (2014), bahwa ilmu administrasi publik saat ini tengah mengalami krisis, baik krisis identitas, ideologi, dan ketidakmampuan dalam menjelaskan realitas kontemporer.

Di tengah krisis yang dialami oleh ilmu administrasi publik, maka perlu diagnosa dan resep yang tepat untuk menyelesaikan krisis tersebut. Ketidakmauan dan ketidakmampuan merespon perubahan, justru akan membuat krisis tersebut semakin dalam, dan persoalan yang lebih serius, sikap antiperubahan akan membuat relevansi ilmu administrasi publik menjadi dipertanyakan sekaligus ditinggalkan. Di tengah situasi ini, Magister Ilmu Administrasi Publik (MIAP) di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) menetapkan sikap untuk menyambut positif setiap perubahan dalam tubuh ilmu administrasi publik. Jika yang lain membangun tembok tinggi untuk merespon angin perubahan, MIAP DMKP Fisipol UGM lebih memilih membuat kincir angin untuk merespon perubahan tersebut. Hal ini selaras dengan visi-misi MAP DMKP Fisipol UGM sebagai “Rumah Ide dan Solusi”. Untuk memahami perubahan dalam Ilmu Administrasi Publik kontemporer, dapat dianalisis dari sisi filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Ontologi

Untuk memahami apa itu ilmu administrasi dan apa itu publik, perlu melacaknya secara historis. Ilmu tentang tata kelola pemerintahan atau yang akrab disebut ilmu administrasi negara, sudah ada sejak lama, sejak manusia mulai membangun organisasi sosial secara formal dalam bentuk kerajaan. Pada periode itu, kegunaan Ilmu Administrasi adalah sebagai alat bagi kepentingan penguasa untuk menegakkan kekuasaannya yang cenderung *authoritarian*. Pada perkembangannya, muncul ilmu administrasi modern yang dicetuskan oleh Woodrow Wilson (1887) dalam artikelnya yang berjudul *The Study of*

Administration, yang mana menekankan pentingnya memisahkan Ilmu Administrasi Negara dengan Ilmu Politik. Bagi Wilson, ketika Ilmu Administrasi dipisahkan dari Ilmu Politik, maka akan menghindarkan birokrasi dari oportunisme “binatang politik” yang menghambat proses kerja administrator negara (Wilson, 1889). Pada periode awal ini, lokus ilmu administrasi modern adalah negara, sedangkan fokusnya adalah tentang tata kelola negara dan



penjalanan keputusan politik yang menjadi domain Ilmu Politik (Purwanto & Novianto, 2021).

Pada perkembangannya, fokus dan lokus Ilmu Administrasi Negara tersebut berubah, tidak lagi tersentral pada aktivitas pemerintahan suatu negara.

Perubahan tersebut dapat dilacak dalam dua bentuk: pertama, fokus ilmu administrasi bergeser dari aktivitas pemerintah menjadi aktivitas orang banyak (baik pemerintah dan non-pemerintah, seperti masyarakat, swasta, dan organisasi masyarakat) dan proses pengambilan keputusan yang sebelumnya *top-down* menjadi *bottom-up* atau dari sentralisasi menjadi demokrasi; kedua, lokus Ilmu Administrasi bergeser dari tata kelola pemerintahan menjadi lebih luas, baik yang berurusan dengan manusia dan non-manusia (ruang publik). Pergeseran tersebut yang membuat penyebutan cabang ilmu sosial ini pun berubah, dari Ilmu Administrasi Negara menjadi Ilmu Administrasi Publik.

Perkembangan serupa juga berlangsung dalam mendefinisikan apa itu publik. Secara umum, publik dapat didefinisikan sebagai orang banyak atau umum (nonmanusia), akan tetapi ketika berbicara dalam konteks pengelolaan dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan publik, terjadi berbagai polemik hingga saat ini. Frederickson (1997) bahkan menyebut bahwa Ilmu Administrasi Publik secara gradual telah kehilangan makna publik, sehingga para administrator publik terus berupaya mencari dan mendefinisikan konsep tersebut (Ringeling, 2015). Salah satu definisi publik terbaru adalah dari Gripsrud et al. (dalam Ringeling, 2015: 294), yang mendefinisikan “publik” dalam empat pengertian yang berbeda. Pertama, publik merujuk ke tempat fisik, seperti taman dan alun-alun atau tempat komunal, yang terbuka untuk setiap individu dan dapat diakses oleh setiap orang. Sehingga, taman yang dimiliki secara privat tidak dapat disebut sebagai publik. Kedua, publik merujuk ke kategori sosial, yaitu konstruksi atau pengorganisasian sosial yang spesifik, misalnya acara publik yang diselenggarakan secara kolektif oleh masyarakat. Ketiga, publik dalam pembedaannya antara perhatian publik dan privat. Pada konteks ini, sesuatu dimaksud publik ketika memiliki kepentingan bersama untuk semua orang di sebuah pemerintahan sipil, sementara privat tidak memiliki hal seperti itu. Keempat, publik sebagai kumpulan pandangan individu, seperti opini publik dan diskursus publik.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat perubahan ilmu administrasi publik kontemporer secara ontologi, yaitu dari yang berfokus dan lokus ke sarwapemerintah menjadi ke publik secara luas. Konsekuensi dari perubahan ini,



maka kajian ilmu administrasi publik pun meluas, tidak hanya terbatas pada manajemen pemerintahan, tetapi juga tata kelola ruang publik, diskursus publik, pengorganisasian publik, dan partisipasi publik.

Epistimologi

Dalam konteks epistimologi, tentang bagaimana mendekati realitas, juga telah mengalami perkembangan. Di tengah perkembangan teknologi digital seperti saat ini, memungkinkan bagi ilmuwan administrasi publik melakukan penelitian dengan bantuan teknologi digital, sebuah hal yang tidak mungkin dilakukan para peneliti sebelum perkembangan teknologi seperti sekarang. Penelitian dengan alat bantu teknologi digital ini dapat dilakukan dalam dua konteks: pertama, dalam proses pengambilan data, di mana peneliti dapat memanfaatkan survei secara online, mengambil data di *big data*—misalnya data cuitan di Twitter tentang tema tertentu—, melakukan observasi partisipan secara daring, atau melakukan diskusi berkelompok dan wawancara mendalam secara daring; kedua, dalam proses pengolahan data, yang mana ilmuwan administrasi negara dapat memanfaatkan alat bantu teknologi digital seperti SPSS, Stata, NVivo, dan juga yang lain.

Dalam konteks ilmu sosial, teknologi digital dapat digunakan untuk memahami realitas yang semakin kompleks dan terus berubah. Sehingga memungkinkan bagi ilmuwan administrasi publik memprediksi kehendak dan persepsi publik dengan lebih baik, apalagi di tengah semakin meluasnya lokus dan fokus dalam ilmu administrasi modern. Melalui data tersebut, dapat dimanfaatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan, proses demokrasi, dan pengambilan keputusan dengan lebih baik.

Aksiologi

Perkembangan teknologi digital, tidak hanya memudahkan peneliti dalam mengambil data dan memahami realitas secara lebih mendalam, tetapi juga membantu memperbaiki proses administrasi publik. Hal ini selaras dengan konteks aksiologi, yaitu tentang kegunaan atau pemanfaatan hasil penelitian. Dalam pemanfaatan hasil penelitian, ada dua paradigma yang berkembang dalam ilmu sosial, yaitu positivisme dan post-positivisme. Bagi kaum positivisme, tugas peneliti telah selesai ketika hasil penelitiannya sudah terbit (dalam bentuk laporan penelitian, jurnal, dan yang lain). Sementara bagi kaum post-positivisme, tugas peneliti tidak selesai saat penelitiannya terbit, akan tetapi berlanjut ke



bagaimana mendorong perubahan ke arah yang lebih baik sebagaimana hasil penelitian yang mereka lakukan. Walaupun terjadi kontradiksi dalam dua paradigma tersebut, keduanya sama-sama dapat menggunakan teknologi digital dalam memanfaatkan hasil penelitian, baik untuk menyebarluaskan hasil penelitian atau mendorong berbagai ide dan alternatif secara lebih luas. Kemudahan dan manfaat teknologi digital ini tidak mungkin dilakukan oleh ilmuwan administrasi publik pada periode sebelumnya, di mana ilmu hanya cenderung dikuasai segelintir orang, karena proses distribusi pengetahuan terhambat jarak dan waktu.

Dalam konteks filsafat aksiologi, relevansi Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Kebijakan lebih menonjol dibanding cabang ilmu sosial lain, apalagi di tengah perkembangan lokus dan fokus kajian administrasi publik. Peter deLeon dan Danielle M. Vogenbeck (2007) mengidentifikasi perbedaan tersebut karena Ilmu Administrasi Publik—yang juga membicarakan kebijakan publik—berorientasi pada masalah dan hampir selalu mengajukan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal berbeda terjadi dalam ilmu lain, misalkan ilmu politik, komunikasi, hingga sosiologi, di mana mengajukan rekomendasi penyelesaian masalah bukanlah bagian utama dalam kajian yang dilakukan. Dalam cabang ilmu yang terakhir disebut ini, tujuan utamanya adalah menjelaskan suatu masalah secara mendetail dan ke akar-akarnya dari sudut pandang keilmuannya masing-masing, tidak mengarah ke rekomendasi dan alternatif tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Krisis identitas, ideologi, dan kemampuan memahami realitas, menjadi tantangan yang dihadapi oleh ilmu administrasi publik pada abad ke-21 seperti saat ini. Krisis tersebut cenderung semakin membesar, ketika dihadapkan dengan ketidakmauan dan ketidakmampuan administrator publik dalam menyikapi adanya berbagai perubahan. Pada kenyataannya, ilmu administrasi telah mengalami banyak pergeseran, dari yang berfokus dan lokus ke sarwapemerintah menjadi ke sarwa-publik. Hal senada juga berlangsung dalam mendefinisikan publik, dari yang sebelumnya erat kaitannya dengan orang banyak (manusia) menjadi lebih luas, meliputi kumpulan orang, tempat fisik, kategori sosial, dan berbagai pandangan individu ataupun kelompok (opini publik). Newman dalam *“Rethinking ‘The Public’ in Troubled Times”* (2007) menilai kepublikan tradisional yang menempatkan negara pada sentral analisis, yang mana kemudian menerjemahkan tindakan negara mewakili kepentingan masyarakat luas dan



merupakan domain publik, tidak lagi relevan dan mampu menganalisis realitas terbaru di era modern yang lebih kompleks dan terus berubah. Sehingga, berbagai perubahan perlu dilakukan, baik dalam konteks ontologi, epistemologi, dan aksiologi, agar ilmu administrasi publik tetap relevan.

b. Problem-Based Learning (PBL)

Problem-Based Learning (PBL) adalah pendekatan pedagogis yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar dan terlibat secara aktif dalam pemecahan suatu permasalahan. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memecahkan masalah dalam pengaturan kolaboratif, membentuk mental dalam belajar, dan membentuk kebiasaan belajar mandiri melalui latihan dan refleksi. Dalam pengaturan PBL yang khas, pembelajaran dipicu dari masalah yang membutuhkan penyelesaian (Yew & Goh, 2016).

Mahasiswa membuat hubungan dengan "*perplexity, confusion, atau doubt*" ini dengan mengaktifkan pengetahuan individu dan kolektif mereka sebelumnya dan menemukan sumber daya untuk memahami fenomena tersebut; mereka juga terlibat dalam pembelajaran sebaya melalui diskusi kelompok kecil dan mengkonsolidasikan pembelajaran mereka melalui tulisan reflektif (Yew & Goh, 2016). PBL menjadi sebuah strategi baru untuk dapat menarik perhatian para pendidik dengan memberikan kerangka kerja instruksional sebagai pendukung pembelajaran yang aktif dan berkelompok yang didasarkan pada keyakinan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika mahasiswa dapat membangun bersama-sama ide melalui interaksi sosial dan pembelajaran yang mandiri.

PBL merupakan suatu *pedagogical system* yang digunakan dalam mengajar program sarjana maupun pascasarjana, khususnya dalam ilmu kedokteran dan berbagai bidang hukum seperti, hukum, teknik, psikologi, dan *liberal arts*. Prinsip dasar dari metode ini yaitu *the use of realistic problems* sebagai titik awal dalam metode pembelajaran mandiri berbasis kelompok kecil yang akan dipandu oleh seorang tutor yang bertindak sebagai pemandu proses transfer ilmu (Moallem et al., 2019). PBL memiliki enam karakteristik penentuan:

1. Penggunaan "masalah" sebagai awal pembelajaran;
2. Mahasiswa bekerja sama dengan kelompok kecil;
3. Tutor yang fleksibel, karena dalam memberikan pembelajaran, karena memiliki jumlah kelas yang terbatas;
4. Pembelajaran dimulai dari mahasiswa;
5. Diberikan waktu yang cukup untuk belajar secara mandiri; dan



6. Tugas mahasiswa dalam PBL adalah membangun teori melalui diskusi kelompok kecil dan pembelajaran mandiri.

De Grave membandingkan dampak dari adanya diskusi permasalahan dalam kelompok dan individu (Moallem et al., 2019). Mereka menemukan bahwa diskusi dalam kelompok kecil lebih efektif dan berdampak positif yang besar, daripada secara individu. Diskusi dalam kelompok menunjukkan adanya elaborasi pada pengetahuan dan bisa belajar dari individu lainnya. Menurut para ahli, terdapat delapan kriteria dampak dari PBL (Moallem et al., 2019) yaitu:

1. Dapat merangsang pemikiran, analisis dan penalaran;
2. Dapat memastikan pembelajaran mandiri;
3. Penggunaan pengetahuan dasar sebelumnya;
4. Mengusulkan konteks yang nyata/realistik;
5. Mengarah pada penemuan tujuan pembelajaran;
6. Dapat membangkitkan rasa ingin tahu lebih lanjut; 7. Memastikan keluasan kontekstual; dan
8. Dapat memilih kosakata yang tepat.

Tetapi dalam studi lain, Dolmas et al. (1995) meneliti hubungan antara tujuan belajar yang dihasilkan mahasiswa secara berkelompok dan mandiri. Terjadi tumpang tindih yang besar antara tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang dihasilkan selama diskusi kelompok bukan menjadi satu-satunya faktor mahasiswa memutuskan untuk belajar mandiri. Faktor lainnya yaitu seperti bimbingan tutor, konten yang sebelumnya pernah dibahas, wawasan yang didapatkan selama belajar mandiri, dan sifat dari sumber belajar yang ada.

Tutor (fasilitator) bertindak sebagai pemandu mahasiswa dalam belajar, khususnya dalam menganalisis permasalahan dan memfasilitasi siswa dalam memahami ide-ide yang dibuat melalui diskusi dan *sharing* (Yew & Goh, 2016). Peran tutor dalam PBL berbeda dengan tutor konvensional. Pada PBL, tutor diharapkan dapat memberikan fasilitas dan turut aktif dalam pembelajaran mahasiswa dan mendorong partisipasi mahasiswa secara aktif meskipun dalam berkelompok. Tutor juga berperan aktif dalam *scaffolding* pembelajaran dengan menyediakan kerangka kerja (silabus) untuk mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka. Dengan menggali cara berpikir mahasiswa lebih dalam, maka hubungan tutor dan mahasiswa dapat terlihat dengan baik.

Terdapat lima tingkat pelatihan dalam pengajaran:



1. Pengenalan PBL sebagai model pembelajaran, berpusat pada mahasiswa. Langkah ini memungkinkan peserta untuk memahami manfaat dan keterbatasan PBL, serta harapan dari tutor.
2. Observasi realisasi PBL yang dilakukan oleh tutor ahli (the course instructor) meliputi observasi peran tutor, proses perumusan tujuan pembelajaran, dan penyajian materi yang diteliti. Langkah ini membantu menumbuhkan pemahaman tentang peran tutor dan mahasiswa dalam PBL.
3. Memperoleh pengalaman langsung sebagai tutor, diikuti dengan evaluasi kritis terhadap peran tutor. Dalam beberapa kasus, cara terbaik untuk belajar yaitu *learning by doing*.
4. mempraktikkan peran tutor dalam sejumlah siklus akademik. Hal ini memungkinkan tutor untuk terus mengembangkan keterampilan tutor PBL mereka dan merefleksikan proses ini.
5. Review, refleksi, dan modifikasi kurikulum PBL yang sedang berlangsung. Kursus pelatihan tutor PBL mencakup Level 1 dan 2 dari paradigma ini, sedangkan umpan balik diperoleh setelah peserta mencapai pembelajaran Level 3. Sesi pagi (Level 1) termasuk kuliah dan kegiatan kelompok kecil tentang proses PBL dan dukungan untuk menggunakan metode pengajaran ini dalam literatur. Sesi sore termasuk tutorial tiruan (Level 2) dimana peserta kursus mengamati proses PBL secara langsung.

Untuk menerapkan model PBL, harus dilakukan studi penggabungan seluruh variabel yang relevan untuk diuji dengan semua hubungan. Misalnya, adakah permasalahan dengan tutor yang berdampak pada pencapaian pembelajaran mahasiswa?; adakah hubungan antara masalah dan kelompok, waktu yang dihabiskan bersama kelompok dan secara mandiri?. Sehingga Gijsselaers et al.

(1990) memberikan elemen kunci dari PBL:

1. Kualitas masalah
2. Kinerja dosen
3. Pengetahuan sebelumnya
4. Fungsi kelompok
5. Waktu yang dihabiskan
6. Minat pada materi pembelajaran

Studi mereka menunjukkan bahwa kualitas masalah memiliki pengaruh yang besar pada fungsi kelompok dan waktu yang dihabiskan jika belajar mandiri. Selain itu, kualitas masalah dapat berpengaruh signifikan terhadap minat intrinsik



mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Oleh karena itu, idealnya seorang tutor harus ahli di bidangnya masing-masing dan ahli dalam memfasilitasi proses belajar mahasiswa (Moallem et al., 2019).

Sketsa PBL pada sifat konstruktif kognitif:

1. Diskusi awal masalah dalam kelompok kecil mahasiswa yang mengarah pada aktivasi pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya ini dielaborasi secara kolaboratif untuk membangun teori tentatif yang menjelaskan fenomena yang dijelaskan dalam masalah. Konstruksi kognitif yang dihasilkan dari latihan oleh mahasiswa yang selanjutnya difasilitasi pemahaman informasi baru.
2. Masalah mendorong pembelajaran melalui pembangkitan minat situasional. Hasil studi telah menunjukkan bahwa pengenalan masalah dalam situasi pembelajaran mengarah pada peningkatan minat situasional dalam topik yang ada, dan bahwa minat situasional ini sebagian besar dipertahankan selama pembelajaran (walaupun tampaknya "dipuaskan" oleh pengetahuan baru yang diperoleh dan berkurang dari waktu ke waktu). Tingkat minat situasional yang lebih tinggi, pada gilirannya, terkait dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi.
3. Tutorial kelompok kecil tidak hanya memiliki manfaat kognitif. Mereka juga berkontribusi pada mental mahasiswa di dalam kelas secara sosial dan akademis, yang melindungi mereka dari putus sekolah dini (Tinto, 1997). Selain itu, karena dalam kelompok-kelompok ini fokusnya adalah pada interaksi yang bertujuan untuk menjelaskan materi pelajaran satu sama lain, mahasiswa didorong untuk belajar secara teratur. Ini mungkin menjadi alasan mengapa kurikulum PBL cenderung memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi.
4. Pengetahuan materi pembelajaran dari tutor, kemampuan mereka untuk berhubungan dengan mahasiswa, dan kemampuan mereka untuk kongruen secara kognitif dengan mahasiswa harus mencakup keseluruhan dalam PBL. Temuan di area ini menunjukkan bahwa tutor yang baik menyediakan perancah yang fleksibel; yaitu, mendukung pembelajaran mahasiswa secara "just-in-time".
5. Seorang mahasiswa di kelas PBL terbukti lebih bersemangat menggunakan buku daripada mahasiswa dalam program konvensional, menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mandiri dalam belajar. Satu studi menunjukkan



bahwa pada awalnya mahasiswa tidak belajar banyak di luar terhadap masalah pembelajaran yang dihasilkan dalam kelompok kecil, sedangkan kinerja terbaik pada tes terkait dengan kemampuan belajar di luar masalah pembelajaran yang dihasilkan.

Pengaruh PBL terhadap Hasil Belajar Sosial (Moallem et al., 2019):

1. Keterampilan interpersonal
2. Keterampilan intrapersonal
3. Pengaturan diri dan pengarahan diri sendiri
4. Kesadaran diri atau konsep diri dan efikasi diri
5. Metakognisi atau refleksi
6. Motivasi dan ketekunan
7. Empati dan simpati
8. Sikap dan persepsi

c. Tema Kuliah Administrasi Publik di Berbagai Universitas

Hasil review dari berbagai perguruan tinggi didapatkan peta tema dan nama mata kuliah bidang administrasi publik sebagai berikut.

Tabel 1. Tema dan Mata Kuliah Bidang Administrasi Publik

No	Tema Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	
1	Policy Analysis, Policy Design, Making Policy	• Policy Analysis, Policy Design and Analysis • Systemic and Integrated Policy Design • Policy Analytics in Finance and Banking • Making Policy, Policy-Making in the Real World • Foundations of Policy Analysis	• Project Cycle Management • Development Policies in the Global Context • Diplomacy and Policy • Analyzing Cases of Public Policies • ODA Management and Evaluation



No	Tema Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	
2	Method	• Social Research Method • Quantitative Method	• Statistical Analysis • Research Workshop in Public Administration
3	Economy	• Economics and Development • Government and the Market Economy • Foundation in Accounting • Microeconomic Theory • Macroeconomic Theory • Microeconomics Analysis • Macroeconomics Analysis • Environmental Economics • China in the International Economy	• Strategic Debates on Economic Change, • Strategy and Emerging Markets • Project Economics and Finance • Applied Economics: Cost-Benefit Analysis • Public Finance • Economics for Government • Public Budget Management • Federal Budgeting and Tax Policy
4	International and Global	• International Political Economy • Globalisation and Governance, • Strategy and Security in the Asia-Pacific • International Organisations, • International Security • Globalisation and Governance • Global Environmental Politics,	• International Organization and Global Politic, • International development policy, • Global politics: the globalisation of world politics • Climate change adaptation and development“ • Global Health and Global Politic • International Food and Security



No	Tema Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	
		• International Human Rights I and II • Politic and International Affair	• China's rise and the international relations of East Asia • Global Public Policy • International Water Policy • International Gender Policy
5	Organization and Human Resource Management	• Organizational Change and Human Resources • Foundations of HRM and IR • Performance Pay: Theory and Evidence • Human Resource management	• Human Resource Strategies • Performance and Rewards • Public Personnel Administration • Talent management, negotiation and conflict resolution in Public Administrations
6	Public Administration	• Comparative Public Administration • Diversity, Ethics, and Leading Public Change • Data Analytics for the Public Good • Perspectives on Public Administration • Public Personnel Administration	• Modern Public Administration • Administration operation • The Policy Process, Legal Issues in Public Administration • Advocacy Policy
7	Leadership	• Global Leadership and Public Ethic • Public Service Leadership • Leadership and Decisionmaking Skills • Middle Leadership	• Administrative Leadership • Public Leadership and • Management Techniques • Leadership in a Changing Workplace



No	Tema Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	
8	Government	• Government and Public Institutions • American, State, Local Government • Powers of Government • Government, Markets, and Global Change	• Government and the Market Economy • Operations of the Chinese Government • Government Performance Management • Government and Transparent
9	Financial Management	• Public Financial Management • Economic-financial management and budget management in Public Administrations • Financial Management for • Non-profit Organization	• Budgeting and Financial Management • Public Fiscal Administration • Financial Management for Public Organization • Financial Management for Policy Maker
10	Governance	• Traditional Chinese Thinking on Governance • Collaborative Governance • NGOs and Governance • Governance and State Building • Decentralization, Governance & Sustainable Development	• Practices in Better and Effective Governance • The governance and politics of the European Union • Globalisation and Governance • Public Management and Governance • New models for governance: strategy, innovation, decentralization



No	Tema Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	
		Governance and Good Governance	
11	Politik	- Strategic Decision-making - Understanding Politics - Political Analysis - Wellbeing in Politics and Policy - Dialogue, Facilitation and Consensus Building	- Politics of international aid - Political Institutions and Policy Processes - Empirical Political Analysis - Power Politics and policy - Political Islam and Governance
12	Big Data, ICT, E-Government	- Big Data, Official Statistics, and Public Policy - Data Analytics-Science - Art and Applications - Artificial Intelligence - Data and Public Policy - Bitcoin, Ethereum, Digital Currencies and Public Policy 3D Printing Robot, and Public Policy - Digital Transformation of Government - Data Analytics and Sustainable Development in Developing Countries	- Professional Practice in IT - Services Science Management and Engineering - Understanding IT Innovations, - Project Management in IT - E-government - Management Information Systems - Basic Statistics (preparatory course) - Evaluation of International Development Cooperation Evidence-Based Public Project Management, - AI Policy in the Developing Countries: Needs and Alternatives



No	Tema Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	
13	Program, Strategic planning	• Development Strategy and Planning • Development Projects and Programmes • Right-based project design and evaluation • Project Process Planning and Control	• Strategic Portfolio and Program Management • Program/Project Management • Strategic Planning for Public Sector Leaders

2.2 Tracer Study

Dari [hasil tracer study](#) yang dilakukan, lulusan Program Studi S2 MIAP DMKP Fisipol UGM telah cukup baik. Respon dari pengguna terhadap lulusan menyatakan bahwa lulusan Program Studi S2 MIAP selain memiliki etos kerja yang tinggi dan etika kerja yang baik, juga menguasai bidang keilmuan administrasi publik. Sebagaimana diuraikan dalam hasil evaluasi formatif di atas, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang sangat cepat juga menuntut SDM birokrasi untuk responsif dan fleksibel. Dari hasil tracer dan FGD yang dilakukan bersama alumni dan pengguna, terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk dikembangkan secara lebih memadai dalam desain kurikulum Prodi S2 MIAP Fisipol UGM. Berikut diuraikan aspek aspek yang diberikan penekanan oleh alumni dan pengguna lulusan.

a. Isu Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Menciptakan reformasi birokrasi dilakukan melalui penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Hal lain yang dilakukan adalah merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen



pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Jalannya program reformasi birokrasi yang dipengaruhi berbagai aspek baik internal maupun eksternal. Secara internal reformasi birokrasi berhadapan dengan politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan yang semuanya bermuara pada lemahnya reformasi birokrasi yang dijalankan. Politisasi dan kooptasi menghalangi ide-ide netralitas dan profesionalitas sehingga rentan terhadap terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Hingga saat ini halhal ini masih terus berlangsung terbukti dari masih relatif tingginya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Implementasi dari reformasi birokrasi membutuhkan penegakan hukum. Saat ini masih dirasakan lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment. Pada aspek administrasi kelembagaan masih dijumpai bahwa kerja birokrasi belum merupakan fungsi pelayanan publik melainkan fungsi dari terlaksananya aktivitas birokrasi.

Secara eksternal implementasi reformasi birokrasi berhadapan dengan globalisasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan serta revolusi industri/ perkembangan teknologi yang semakin cepat. Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 Tujuan Berkelanjutan pada tahun 2030. ASN sudah seharusnya memahami dengan baik tujuan-tujuan itu, sehingga ASN dapat memposisikan peran Indonesia di kancah global maupun regional. Masih dalam tataran global terdapat sejumlah isu lain yang juga sangat penting. Pemanfaatan “Big Data”, pelayanan terintegrasi (integrated service), pelayanan yang lebih megapodid keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan artificial intelligence di ranah publik. Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” juga menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IoT) akan mendorong instansi pemerintah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat.

Berbagai tantangan yang dihadapi reformasi birokrasi ini masih menjadi isu penting untuk dikedepankan dalam desain kuliah. Dalam era globalisasi, ASN sangat



penting untuk mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan jaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

b. Isu Profesional ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen utama sumber daya yang berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Mencapai keberhasilan itu terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang besar, untuk itu ASN harus memiliki dasar profesional. Profesionalisme ASN merupakan sebuah kemampuan ASN untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing. Profesionalisme menyangkut kesesuaian antara kemampuan birokrat dengan kebutuhan tugas (*task requirements*).

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 4 juta ASN, namun demikian dari laporan BKN teridentifikasi bahwa hampir di seluruh daerah di Indonesia kesesuaian antara keahlian ASN dengan sumber daya yang tersedia masih berada dalam angka kurang dari 5%. Ini sebuah tantangan bagi perguruan tinggi umumnya, khususnya Prodi S2 MIAP yang mendidik para birokrat dan calon birokrat. Tantangan ini menjadi semakin kuat berhadapan dengan budaya organisasi publik yang berbenturan dengan perkembangan teknologi yang semakin massif. Tantangan ini menuntut ASN menjadi semakin profesional dan terampil, untuk itu maka materi Kuliah berkaitan dengan ASN yang responsif namun tetap profesional adalah aspek yang sangat penting untuk dikedepankan.

c. Isu Sistem Birokrasi Berbasis Elektronik dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kontrak Kerja

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018). SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.



Penerapan SPBE secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penilaian kinerja ASN. Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada dasarnya, perjanjian ini adalah kesepakatan dan komitmen antara pimpinan unit kerja yang lebih tinggi dengan pimpinan unit kerja dibawahnya guna mencapai target kerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Ada tantangan tersendiri untuk memadukan kedua aspek ini, utamanya bagi pegawai yang masih bersifat kontrak. Sistem kerja (SPBE) maupun sistem penilaian kinerja dibangun dengan basis pegawai yang telah memiliki status tetap. Sementara pada sisi lain hingga saat ini pada aspek pemerintahan masih dijumpai ASN yang belum memiliki status tetap. Mereka ini belum terakomodasi dalam sistem-sistem yang dibangun. Dibutuhkan keterampilan yang cukup untuk dapat menyikapi aspek “benturan-benturan” semacam ini. Terdapat cukup banyak konflik norma dalam berbagai peraturan, konflik ini menjadi semakin rumit Ketika dihadapkan pada perkembangan masyarakat secara umum yang membuat peraturan menjadi semakin tidak memadai untuk menjadi panduan. Dalam desain kuliah pemberian keterampilan praktis dalam sebuah kerangka yang logis sangat dibutuhkan agar ASN memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan benturan itu.

d. Isu Pengelolaan Risiko di Sektor Publik

Manajemen Risiko (MR) merupakan suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian melalui identifikasi, pemahaman, tindakan, dan komunikasi isu-isu risiko. Instansi sektor publik memiliki risiko dalam kegiatannya melayani masyarakat. Untuk itu selalu dibutuhkan Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP). Hingga saat ini pengetahuan yang secara spesifik mendiskusikan mengenai pengelolaan risiko di sektor publik belum diakomodasi secara spesifik. Materi-materi risiko sektor publik diberikan bersamaan dengan materi-materi yang lainnya, yang terkadang tidak saling terhubung.

Dalam desain kuliah yang akan datang materi mengenai pengelolaan risiko di sektor publik harus dipertimbangkan sebagai mata kuliah atau target mata kuliah yang lebih jelas, agar diperoleh lulusan yang memiliki kemampuan handal dalam mengelola risiko yang akan muncul di sektor publik.

e. Isu Pemanfaatan *Big Data* untuk Kebijakan Publik

Data selalu menjadi tulang punggung masyarakat modern. *Big data* merupakan istilah umum dari jumlah masif yang didapatkan dari pengumpulan data dari berbagai



sumber, yang terlalu besar, mentah, dan terlalu tidak terstruktur untuk dianalisis menggunakan teknik pengolahan *database* biasa. Adanya *big data* ini mampu menjadi peluang bagi pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan mengingat luasnya data yang tersedia. *Big data* penting untuk dikelola karena dapat mengurangi biaya dan waktu dalam penggunaannya sebagai media peramalan, penelitian dan pendukung pembentukan kebijakan publik, mengatasi masalah kesehatan masyarakat, hingga menguatkan pertahanan dan keamanan nasional. Namun demikian untuk dapat mengakses data-data ini dibutuhkan keterampilan tersendiri, apalagi untuk melakukan analisis atas data yang sangat luas. Dalam desain kuliah yang akan datang terdapat tuntutan yang cukup tinggi untuk mengakomodasi kebutuhan pemanfaatan *big data* ini dalam pengambilan kebijakan publik.

f. Isu Pengawasan Kebijakan (Analisis Dampak Kebijakan)

Regulasi merupakan instrumen yang penting untuk mencapai tujuan kebijakan, baik secara sosial, ekonomi, dan kesejahteraan pada umumnya. Pemerintah memiliki berbagai macam instrumen regulasi yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman kebutuhan warga negara. Setiap kebijakan atau peraturan yang dilaksanakan akan selalu menghasilkan dampak positif maupun negatif. Untuk menilai perlu tidaknya peraturan baru sebagai usulan solusi suatu masalah publik, OECD (2008) mengidentifikasi beberapa informasi yang harus diperhitungkan. OECD menyaratkan kelengkapan informasi tentang: (1) Apa kelompok dalam masyarakat yang terpengaruh?; (2) Berapa ukuran dari masing-masing kelompok?; (3) Bagaimana sifat dari dampak pada masing-masing kelompok?; (4) Berapa besar efek ini?; dan (5) Berapa lama efek ini bertahan?. Sehingga, dalam menentukan ukuran masalah, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan semua efek pada pihak yang berbeda dan dalam konteks tujuan yang sudah teridentifikasi. Rumit dan kompleksnya kebijakan dan dampak kebijakan itu memunculkan kebutuhan keahlian dalam menilai sebuah kebijakan. Untuk itu maka dalam desain kuliah yang akan datang materi materi yang berkaitan dengan analisis dampak kebijakan sangat penting untuk dikedepankan.

g. Isu Transformasi Digital di Sektor Publik

Transformasi digital saat ini merupakan sebuah kebutuhan, baik bagi sektor privat maupun bagi sektor publik. Saat ini transformasi digital di sektor publik telah dilakukan, namun dampak dan performa yang dihasilkan belum optimal. Transformasi digital di sektor publik memiliki tantangan yang lebih luas dibandingkan sektor privat, di antaranya: kualitas sumber daya manusia (SDM), isu kebijakan dan regulasi, isu



keamanan dan perlindungan privasi, isu infrastruktur teknologi informasi (TI), integrasi sistem dan layanan, serta resistensi organisasi.

Masih tingginya tantangan dan hambatan, utamanya dalam aspek sumber daya manusia dalam transformasi digital di sektor publik menjadi fokus penting bagi Prodi S2 MIAP Fisipol UGM. Untuk itulah maka desain kuliah yang mengedapankan aspek transformasi di sektor publik menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi.



BAGIAN III LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

3.1 Nilai-Nilai Dasar Universitas Gadjah Mada

- a. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, musyawarah, dan keadilan.
- b. Nilai-nilai keilmuan yang meliputi nilai-nilai universalitas dan objektivitas ilmu, kebebasan akademik dan mimbar akademik, penghargaan atas kenyataan dan kebenaran guna keadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan.
- c. Nilai-nilai kebudayaan yang meliputi toleransi, hak asasi manusia, dan keragaman.

3.2 Landasan

- a. Landasan Filosofis berisi mandat nasional dan mandat akademik. Mandat nasional adalah mandat untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa (national impact oriented). Mandat akademik adalah mandat untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan (scientific oriented). UGM dimandatkan untuk menjalankan keduanya sekaligus secara selaras, seimbang, dan saling menunjang.
- b. Landasan Historis adalah mandat kepada UGM untuk konsisten dalam menjalankan mandat filosofisnya dengan selalu hadir, terlibat, dan memberikan kontribusi optimal dalam momen krusial perjalanan sejarah bangsa sejak Era Awal Kemerdekaan, Era Revolusi, Era Orde Baru, Era Reformasi, sampai dengan Era Pendalaman Demokrasi sekarang ini.
- c. Landasan Yuridis adalah mandat kepada UGM untuk selalu taat pada regulasi atau aturan hukum yang ada baik dari sisi kelembagaan, akademik, maupun tata kelola.
- d. Landasan Sosiologis adalah mandat kepada UGM untuk selalu kontekstual baik dalam artian update dan upgrade atas situasi kekinian dan ke depan (the emerging) maupun kontekstual dalam artian berbasis karakter yang digali dan dibangun dari kebudayaan Indonesia agar mengakar kuat dan menjulang tinggi serta senantiasa relevan dan dapat berkontribusi secara optimal.
- e. Landasan Operasional adalah mandat kepada UGM untuk secara cerdas merumuskan dan mengembangkan instrumen pelaksanaan agar mandat filosofis UGM bisa dijalankan secara lebih optimal dari waktu ke waktu (deliverability).



3.3 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- i. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor: 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
- j. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
- k. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan, dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada; dan
- l. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor: 1222/SP/SK3/VI/2009 tentang Pedoman Akademik Program Pendidikan Master (S2) Fisipol UGM.



BAGIAN IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN *UNIVERSITY VALUE*

4.1 Visi, Misi, dan Tujuan UGM

a. Visi

Sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

b. Misi

Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

c. Tujuan

Sebagaimana dimandatkan dalam Statuta UGM, tujuan jangka panjang UGM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan UGM sebagai lembaga nasional ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi yang menanamkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada mahasiswa demi kelangsungan dan kehidupan manusia pada umumnya, demi perkembangan bangsa dan rakyat pada khususnya, sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Membentuk manusia susila yang mempunyai keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya, dalam arti berjiwa bangsa Indonesia, berbudaya Indonesia, dan mempunyai dasar keinsafan hidup berketuhanan Yang Maha Esa; berperilaku kemanusiaan yang adil dan beradab; demokratis; diliputi kenyataan dan kebenaran; cerdas; kreatif; terampil; mampu berkomunikasi; dan berkesadaran lingkungan untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan hidup kemasyarakatan; serta masa depan bangsa dan negara Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

4.2 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Fakultas

a. Visi

Visi atau cita-cita kelembagaan, yang ditargetkan untuk dicapai oleh Fisipol UGM pada 2050 adalah “Fakultas bereputasi internasional yang mampu mendorong kemajuan bangsa menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2050”.

b. Misi



Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Fisipol UGM menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mendidik bangsa menjadi manusia unggul dalam membangun bangsa.
2. Mengembangkan penelitian inovatif yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

c. Tujuan

Dari setiap rumusan Misi tersebut ditetapkan tujuan untuk dicapai:

1. Menghasilkan lulusan yang berwawasan global, memiliki kecakapan, dan berintegritas tinggi.
2. Meningkatkan kontribusi dalam penguatan kapasitas aktor-aktor pembangunan dan pemerintahan.
3. Memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terpinggirkan.

4.3 Visi , Misi dan Tujuan Departemen

a. Visi

Visi Program Studi Manajemen Kebijakan Publik: menjadi program studi yang dikenal secara internasional di bidang manajemen dan kebijakan publik pada tahun 2025.

b. Misi
Untuk mencapai visi yang ditetapkan diperlukan pernyataan untuk mencapainya berupa misi yang akan dijalankan. Misi Departemen Manajemen Kebijakan Publik adalah:

1. Mendidik mahasiswa agar memiliki wawasan komprehensif dalam teori dan praktik dalam bidang manajemen dan kebijakan publik.
2. Mengembangkan penelitian inovatif dalam bidang manajemen dan kebijakan publik.
3. Melakukan hilirisasi hasil hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian masyarakat yang adaptif terhadap dinamika publik di bidang manajemen kebijakan publik.

c. Tujuan

Agar supaya visi misi lebih operasional perlu ditetapkan tujuan, maka tujuan-tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Menghasilkan lulusan sarjana yang menguasai tiga kompetensi: komunikasi analitis, manajerial, dan politis dalam bidang manajemen dan kebijakan publik.
2. Terselenggaranya pembelajaran berbasis mahasiswa (student centered learning) melalui strategi pengembangan metode pembelajaran yang berbasis riset dan berstandar internasional secara bertahap mulai tahun 2016.
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang berdaya saing internasional dalam bidang manajemen dan kebijakan publik.
4. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan praktik manajemen dan kebijakan publik.



4.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi

a. Visi

Visi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, menjadi institusi unggul/terkemuka (*center of excellent*) di dalam pengembangan pemimpin yang berkarakter. b. Misi

1. Mengembangkan pemimpin yang memahami dan peka terhadap konteks menuju masyarakat berkelanjutan.
2. Mengembangkan keahlian multidisiplin berbasis kajian yang mendalam.
3. Berkontribusi pada penyelesaian masalah publik melalui kolaborasi. c. Tujuan

Agar supaya visi misi lebih operasional perlu ditetapkan tujuan, maka tujuan yang ditetapkan adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi permasalahan kebijakan dan mampu menghasilkan ide ide penyelesaian yang segar serta memiliki integritas yang tinggi. Tujuan ini menjadi panduan untuk menyusun profil lulusan MIAP DMKP Fisipol UGM.



BAGIAN V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

5.1 Tujuan Pendidikan MIAP DMKP Fisipol UGM

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi permasalahan kebijakan dan mampu menghasilkan ide ide penyelesaian yang segar serta memiliki integritas yang tinggi. Tujuan ini menjadi panduan untuk penyusun profil lulusan MIAP DMKP Fisipol UGM.

5.2 Profil Lulusan

Selain mendasarkan diri pada tujuan pendidikan, dalam menyusun profil lulusan MIAP DMKP Fisipol juga mendasarkan pada studi literatur untuk memetakan hasil pembelajaran beberapa program administrasi publik di dunia. Secara umum, pemetaan hasil pembelajaran yang diharapkan program administrasi publik di dunia dapat dilihat diuraian sebagai berikut:

1. Menunjukkan pengetahuan yang cukup tentang:
 - Perspektif historis, komparatif, dan teoretis tentang administrasi publik, manajemen, dan tata kelola.
 - Debat dan pemikiran kunci administrasi publik, manajemen dan tata Kelola secara nasional dan global.
 - Prinsip dan metode penelitian yang relevan dengan administrasi publik, manajemen, dan tata kelola.
 - Sifat, peran dan pengembangan sektor publik dan tren terkini dalam evolusinya.
 - Kebijakan, manajemen sektor publik, pemerintah strategis, dan manajemen keuangan publik dalam keseluruhan kerangka kerja pemerintah.
 - Dasar administrasi publik dan kebijakan publik yang mendukung pencapaian SDGs.
 - Pembacaan dan pemanfaatan statistik.
2. Mampu menganalisis masalah, membuat solusi, dan menerapkan kebijakan terkait:
 - Manajemen dan kepemimpinan organisasi yang efektif.
 - Struktur dan budaya organisasi.
 - Sistem sumber daya manusia.
 - Kebijakan publik.
 - Manajemen diri.
 - Komunikasi.
 - Kerja tim.
 - Konteks politik dan hukum organisasi layanan publik kontemporer/terkini.
 - Kompleksitas dan tantangan administrasi publik, manajemen dan pemerintahan.



3. Memahami proses pembuatan kebijakan publik didasarkan pada teori dan metodologi penting.
4. Merumuskan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan kebijakan dan program publik.
5. Memasukkan berbagai nilai konstitusional dan etika ke dalam analisis dan tindakan kebijakan dan administratif.
6. Mengetahui dan menanggapi tuntutan dan kebutuhan yang diminta masyarakat dari entitas publik.
7. Menginisiasi penelitian di bidang administrasi publik.

Berdasarkan tujuan pendidikan di MIAP DMKP Fisipol UGM dan pemetaan hasil pembelajaran, dibangun kurikulum untuk mendukung tercapainya profil lulusan MIAP DMKP Fisipol UGM. Adapun profil lulusan MIAP DMKP Fisipol UGM yang diharapkan adalah menjadi pemimpin di sektor publik yang memiliki karakter utama, yaitu memiliki etika, mampu berkolaborasi, mampu memecahkan masalah (*problem solver*), peka terhadap konteks/perubahan, dan berinovasi.

Tabel 2. Profil Lulusan dan Deskripsinya

Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
Pemimpin di Sektor Publik	Seorang yang memiliki etika, mampu berkolaborasi, mampu memecahkan masalah (<i>problem solver</i>), peka terhadap konteks/perubahan, dan berinovasi sesuai fokus bidang Prodi S2 IAP, <i>public governance</i> dan <i>digital governance</i> .
Peneliti di bidang Administrasi Publik	Seorang peneliti yang memiliki kompetensi dalam melakukan penelitian di bidang administrasi publik dengan menggunakan metode ilmiah jenjang magister.
Konsultan di bidang Administrasi Publik	Seorang konsultan yang mampu menganalisis isu publik dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis. Profil lulusan ini adalah penggerak kebijakan (<i>policy entrepreneur</i>) yang proaktif, kompeten dalam melaksanakan, mengkomunikasikan, dan mengadvokasi kebijakan, serta memiliki inisiatif untuk menawarkan strategi inovasi guna mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.



5.3 Perumusan CPL

Berdasarkan hasil rapat Tim Kurikulum MIAP DMKP Fisipol UGM dan sesuai dengan SN DIKTI, maka dirumuskan 4 (empat) capaian pembelajaran lulusan, yaitu capaian pembelajaran Sikap, Penguasaan Pengetahuan, Kemampuan Khusus, dan Kemampuan Umum. Capaian-capaian pembelajaran berikut kodenya ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sesuai SN Dikti

Kode	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL 1 (Aspek Sikap)	
1.	Mampu mendemonstrasikan perilaku profesional dan berintegritas dalam bingkai keanekaragaman bangsa.
2.	Mampu mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik.
3.	Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
4.	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
CPL 2 (Aspek Pengetahuan)	
1.	Mampu menganalisis masalah publik dan mengkomunikasikan solusi masalah berbasis bukti
2.	Menguasai teori administrasi publik dan teori-teori yang berkaitan dengan <i>public governance</i> dan <i>digital governance</i> .
3.	Menguasai metode-metode dan instrumen penelitian dalam perspektif <i>public governance</i> dan <i>digital governance</i> .
4.	Menguasai pendekatan berpikir holistik
CPL 3 (Aspek Keterampilan Umum)	
1.	Mampu memimpin dan mengelola perubahan
2.	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang <i>public governance</i> dan <i>digital governance</i> .
3.	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian ilmiah sesuai bidang <i>public governance</i> dan <i>digital governance</i> dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri, melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.

4.	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
5.	Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat didalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
CPL 4 (Aspek Keterampilan Khusus)	
Kode	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
1.	Mampu memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan organisasi dan masyarakat
2.	Mampu merekonstruksi model, strategi atau inovasi dalam bidang <i>public governance</i> dan <i>digital governance</i> dengan berbagai pendekatan dan berbagai metode analisis.
3.	Mampu memformulasikan rencana implementasi kebijakan publik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
4.	Mampu melakukan evaluasi kebijakan publik yang berbasis teknologi informasi untuk mengetahui <i>outcome</i> dan <i>impact</i> dari sebuah kebijakan.
5.	Mampu menyusun rencana perubahan secara individu dan kelompok dengan menggunakan pendekatan <i>participatory impact analysis</i> untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.

Cakupan kompetensi pada CPL juga disajikan menggunakan parameter Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Program Magister (KKNI) level 8 sebagai berikut.

Tabel 4. Cakupan Kompetensi CPL berdasarkan Parameter KKNI

Parameter KKNI	Cakupan Kompetensi
Sains	• Mampu mendeskripsikan perspektif historis, komparatif dan teoritis tentang administrasi publik, manajemen publik dan tata kelola sektor publik. • Mampu menganalisis sifat, peran dan perkembangan terkini sektor publik dan evolusinya • Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang didukung oleh data, hasil pengamatan dan analisis yang terukur, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ilmu administrasi publik.

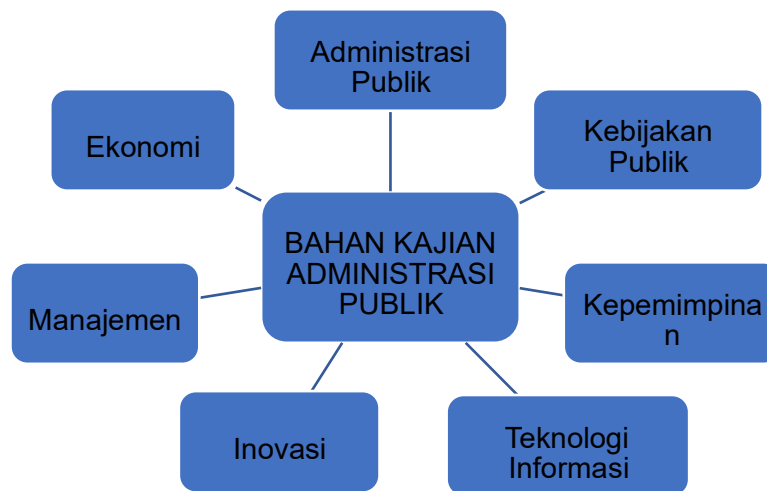


Parameter KKNi	Cakupan Kompetensi
Pengetahuan	• Mampu menguasai teori dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di sektor publik • Mampu melakukan analisis dan evaluasi terhadap fakta dan informasi yang berkaitan dengan administrasi publik
Pemahaman	• Memahami proses pembuatan kebijakan publik berdasarkan teori dan metodologi terkemuka • Mampu menganalisis permasalahan, menciptakan solusi, dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi publik • Mampu melakukan penelitian di bidang administrasi publik
Keterampilan	• Mampu merumuskan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan kebijakan dan program publik • Mampu menghasilkan ringkasan kebijakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan publik
Afeksi	• Memiliki dan mampu menerapkan nilai-nilai konstitusional dan etika dalam analisis dan tindakan kebijakan dan administrasi • Mengetahui dan menanggapi tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap badan publik
Kompetensi	Berpegang pada etika, mampu berkolaborasi, memecahkan masalah, dan berinovasi serta peka terhadap konteks/perubahan
Kompetensi Spesifik Program	• Mampu menunjukkan perilaku profesional dalam kerangka keberagaman nasional. • Mampu mengidentifikasi permasalahan publik dan mengkomunikasikan solusi berbasis bukti • Mampu memimpin dan mengelola perubahan • Mampu memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan organisasi dan masyarakat

BAGIAN VI PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Bahan kajian pada Prodi MIAP DMKP Fisipol UGM disusun berdasarkan pembentukan karakter yang sesuai dengan visi dan misi universitas dan prodi, serta masukan dari alumni, pakar, dan tim pengkaji kurikulum.

6.1 Gambaran *Body of Knowledge* (BoK)



Gambar 1 *Body of Knowledge*

6.2 Deskripsi Bahan Kajian

Tabel 5. Bahan Kajian (BK)

No/Kode	Bahan Kajian	Deskripsi Bahan Kajian
BK1	Ilmu Administrasi Publik	Mata kuliah ini mengajarkan tentang teori, ide, nilai, isu yang berkembang dalam paradigma administrasi publik dan implikasinya terhadap ilmu dan praktik administrasi publik. Dalam konteks hal yang dipelajari antara lain: analisis kebijakan publik, manajemen SDM, teori organisasi publik, kewirausahaan di sektor publik, kebijakan desentralisasi, governance dan kebijakan publik, dan ekonomi sektor publik.



No/Kode	Bahan Kajian	Deskripsi Bahan Kajian
BK2	Ilmu Kebijakan Publik	Mata kuliah ini mencakup konsep teori kebijakan publik meliputi perumusan kebijakan, materi-materi pemahaman dasar tentang masalah dan agenda setting kebijakan, peramalan, alternatif dan rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan paper isu kebijakan publik.
BK3	Ekonomi	Mata kuliah ini menguraikan atau menganalisis mengenai perilaku ekonomi individual baik mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen maupun pasar. Bahan kajian meliputi: Bidang studi ilmu ekonomi, Pola kegiatan perekonomian, Masalah Ekonomi, Permintaan, Penawaran dan keseimbangan pasar, Elastisitas permintaan dan penawaran, Teori tingkah laku konsumen, Teori tingkah laku produsen, Biaya produksi, Pasar persaingan sempurna, Monopoli, Persaingan monopolistik, Oligopoli, menentukan harga faktor produksi, Mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah.
BK4	Manajemen	Mata kuliah memiliki pemahaman tentang teori/konsep-konsep manajemen. Mata kuliah akan membahas fungsi dan tingkatan serta keterampilan dalam manajemen, fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen berdasarkan pandangan para ahli.
BK5	Inovasi	Mata kuliah Inovasi mengkaji tentang isu aktual terkait inovasi. Bahan kajian meliputi konsep dasar perubahan dan inovasi, difusi dan diseminasi inovasi, proses keputusan inovasi, faktor-faktor yang memengaruhi inovasi dan strategi inovasi.



No/Kode	Bahan Kajian	Deskripsi Bahan Kajian
BK6	Teknologi Informasi	Mata kuliah ini diharapkan mampu membangun konsep, pengetahuan, teknik analisis dan implementasinya pada pedagogi konten teknologi informasi, serta memiliki kemampuan adaptif terhadap belajar dan pembelajaran teknologi informasi.
BK7	Kepemimpinan	Mata kuliah ini membahas berbagai konsep, teori, fungsi, tipologi, gaya dan model/ pendekatan kepemimpinan. Pertama, dalam hal ini dibahas mengenai kepemimpinan, peran dan fungsi kepemimpinan, dan hal-hal yang berkaitan dengan dimensi kepemimpinan. Kedua, membahas bagaimana perubahan dalam konteks administrasi publik berpengaruh terhadap kepemimpinan dalam hal ini dijelaskan bagaimana model kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan, bagaimana mekanisme perumusan dan pengambilan kebijakan dipengaruhi oleh perubahan itu sendiri.
BK 8	Ketrampilan	Keterampilan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki oleh pemimpin publik. Keterampilan hanya dapat diasah melalui praktek, untuk itu maka drsain mata Kuliah dirancang sedemikian rupa sehingga mahasiswa dapat berlatih untuk praktek baik dalam ruang Kuliah maupun dalam desain praktek lapangan



6.3 Bahan Kajian, Mata Kuliah, dan CPL

Berdasarkan bahan kajian yang telah dilakukan, maka dipetakan matakuliah yang relevan beserta capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah yang bersangkutan.

Tabel 6. Bahan Kajian, Mata Kuliah dan CPMK

Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	paian Pembelajaran Yang Dibebankan di Mata kuliah (CPMK)
Ilmu Administrasi Publik	<i>Public Administration and Governance</i>	- Memiliki pemahanan dan pengetahuan yang kritis tentang esensi dan perubahan dari konsep, teori, nilai dan paradigma administrasi publik dan reformasi tata kelola sektor publik, baik perspektif klasik maupun kontemporer - Mampu mengenali dengan benar dan memahami secara kritis dinamika pemikiran tokoh-tokoh administrasi publik dan relevansinya/kontekstualisasinya dengan situasi kontemporer. - Mampu mengidentifikasi perbedaan ontologis, epistemologis, metodologis dan empiris antara administrasi publik dengan administrasi bisnis dan bagaimana penerapannya dalam ranah praktis untuk mengelola perubahan.
	Analisis Kebijakan Publik	- Memahami prinsip ekonomi mikro dan makro dan konteks politik/ideologi dari prinsip tersebut - Memahami masalah-masalah publik dari sudut pandang ekonomi dan menganalisis plusibilitas ekonomi dari kebijakan publik - Menganalisis sejauh mana Pemerintah turut serta dalam pengambilan kebijakan publik terkait ekonomi



Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	paian Pembelajaran Yang Dibebankan di Mata kuliah (CPMK)
		4. Merefleksikan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Analisis Data untuk Administrasi Publik	- Memahami beragam potensi dan tantangan penggunaan data untuk Pembangunan - Mampu mendiskusikan dan mereplikasi konsep dan pengimplementasian analisis data dalam berbagai bidang - Mampu menganalisis data statistik dari berbagai sumber data serta menggunakannya untuk menganalisis kebijakan publik yang relevan - Memberikan solusi alternatif bagi institusi publik dalam mengatasi berbagai persoalan dengan menggunakan pendekatan data
	Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	- Mengidentifikasi cakupan, dampak, maupun permasalahan kemiskinan dan kebijakan pengentasan kemiskinan - Menilai efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Indonesia - Mengusulkan solusi alternatif terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan
Ekonomi	Ekonomi untuk Kebijakan Publik	- Memahami prinsip ekonomi mikro dan makro dan konteks politik/ideologi dari prinsip tersebut - Memahami masalah-masalah publik dari sudut pandang ekonomi dan menganalisis plusibilitas ekonomi dari kebijakan publik



Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	paian Pembelajaran Yang Dibebankan di Mata kuliah (CPMK)
		3. Menganalisis sejauh mana Pemerintah turut serta dalam pengambilan kebijakan publik terkait ekonomi 4. Merefleksikan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Ekonomi Politik Pembangunan	1. Memahami konseptualisasi pembangunan melalui pendekatan ekonomi dan politik dalam pengambilan kebijakan 2. Mampu untuk mengidentifikasi peran dan intervensi negara dalam dalam kebijakan pembangunan melalui sudut pandang ekonomi politik 3. Mampu untuk mengusulkan solusi alternatif untuk mengembangkan kebijakan pembangunan dalam sudut pandang ekonomi politik yang mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat
Manajemen	Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Sektor Publik	Memahami prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia sektor publik
	Manajemen Keuangan untuk Sektor Publik	1. Memahami pendekatan yang dipakai di dalam membahas kebijakan keuangan pada tingkat nasional maupun daerah 2. Menganalisis fungsi kebijakan fiskal dari literatur ilmu ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan publik 3. Menganalisis aspek politik dari kebijakan keuangan



Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	paian Pembelajaran Yang Dibebankan di Mata kuliah (CPMK)
		4. Menganalisis rumusan prioritas pembangunan nasional dan daerah pada transisi demokrasi serta sistem alokasi anggaran yang relevan
	Perencanaan Strategis untuk Sektor Publik	1. Memahami pentingnya rencana strategis sektor publik dalam menghadapi situasi yang dinamis, kompleks, dan tidak menentu. 2. Memahami konsep, teori dan model rencana strategis 3. Merumuskan dokumen perencanaan strategis yang ideal berdasarkan seluruh tahapan perencanaan strategis
	Manajemen Risiko dan Audit Kinerja Sektor Publik	1. Menguasai konsep, teori, proses, pendekatan, metode, dan analisis manajemen risiko dan audit kinerja secara tepat 2. Menilai kinerja organisasi publik baik menyangkut output dan outcome (<i>effectiveness, satisfaction, equity, accountability</i>) 3. Mendeteksi sumber masalah yang berasal dari proses (<i>efficiency, productivity</i>), input (<i>economy, quality, ketepatan waktu</i>), lingkungan internal (nilai <i>capability, adequacy, flexibility & adaptability</i>), dan lingkungan eksternal (nilai <i>responsiveness, adaptability, agility</i>) 4. Merancang dan merekomendasikan tindak lanjut untuk koreksi kesalahan dan kelemahan organisasi publik, sekaligus meningkatkan kinerja.



Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	paian Pembelajaran Yang Dibebankan di Mata kuliah (CPMK)
		5. Mengevaluasi dan mengoreksi proses dan kualitas pelaksanaan <i>manajemen risiko dan fungsi audit</i> .
	Manajemen Bencana	1. Menganalisis konsep dan faktor penyebab bencana, serta jenis manajemen bencana dalam kaitannya dengan pembangunan dan kebijakan pengelolaan lingkungan. 2. Menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam mengelola bencana. 3. Menunjukkan pengelolaan bencana di dalam konteks hubungan antar level pemerintah.
Inovasi	<i>Smart City</i>	1. Memahami konsep Smart City 2. Memahami perkembangan teori Smart City 3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di Smart City 4. Mengidentifikasi solusi potensial dalam permasalahan Smart City
	<i>Internet Politics and Public Policy</i>	1. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara perkembangan internet dengan dinamika politik dan proses formulasi kebijakan publik dengan bahasa dan pemahaman sendiri. 2. Mampu menerapkan konsep-konsep internet politics untuk menganalisis fenomena digital activism, hoaks, dan pengaruh media sosial dalam praktik kebijakan publik.



Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	paian Pembelajaran Yang Dibebankan di Mata kuliah (CPMK)
		3. Mampu menjelaskan dan menganalisis perbedaan dan keterkaitan antara collective action dan connective action dalam konteks partisipasi politik digital. 4. Mahasiswa mampu menyusun gagasan atau model baru tentang bagaimana internet dapat digunakan sebagai instrumen partisipasi politik yang konstruktif dalam perumusan kebijakan publik. 5. Mampu mengevaluasi efektivitas fenomena politik digital (seperti <i>clicktivism</i>, agenda <i>setting online</i>, atau kampanye digital) dalam

Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	Capaian Pembelajaran Yang Dibebankan di Mata kuliah (CPMK)
		memengaruhi kebijakan publik dengan kriteria akademik dan empiris.
Teknologi Informasi	<i>Digital Governance</i>	1. Menganalisis konsep, proses, peran, dan penerapan demokrasi digital dalam kaitannya dengan reformasi administrasi publik. 2. Menerapkan praktik demokrasi digital untuk kepentingan organisasi dan masyarakat dalam Tata Kelola Era Digital.
	Bisnis Proses dan Layanan Publik Digital	1. Memahami konsep bisnis proses 2. Menerapkan bisnis proses untuk 3. organisasi publik Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada bisnis proses 4. Mengidentifikasi solusi potensial dalam permasalahan bisnis proses



Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	Capaian Pembelajaran Yang Dibebankan di Mata kuliah (CPMK)
Kepemimpinan	Kepemimpinan dan Inovasi Sektor Publik	- Memahami konsep dan teori kepemimpinan dan inovasi - Memahami dan menganalisis dinamika persoalan kepemimpinan dan inovasi. - Mengembangkan keterampilan cara berpikir kritis dalam melakukan perbaikan yang bersifat berkelanjutan
Ketrampilan	Penilaian Dampak Regulasi (<i>Regulatory Impact Assessment</i>)	- Memiliki pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik/negara. - Melakukan penilaian atas potensi dampak (positif dan negatif) dari sebuah kebijakan/peraturan yang akan dibuat ataupun yang sudah diimplementasikan. - Melakukan analisis dampak regulasi berdasarkan identifikasi masalah-masalah publik secara kontekstual.
	Metode Penelitian	- Memahami apa yang dimaksud metode penelitian penelitian dalam ilmu sosial. - Memahami perbedaan berbagai metode penelitian: kualitatif versus kuantitatif - dan berbagai metode penelitian terapan lainnya. - Merancang desain penelitian secara benar. - Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian. - Membuat proposal & laporan penelitian dengan menggunakan data yang - dikumpulkan dan dianalisis dengan metode penelitian yang tepat.



Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	Capaian Pembelajaran Yang Dibebankan di Mata kuliah (CPMK)
	<i>Mini Research</i>	1. Mampu memahami bagaimana cara memformulasikan pertanyaan penelitian 2. Mampu melakukan literature review secara menyeluruh dengan menggunakan alat penelitian dan database terkini 3. Mampu memahami bagaimana mendesain metodologi riset yang sesuai 4. Mampu memahami bagaimana menerapkan praktik riset yang etik, termasuk dengan protokol IRB 5. Memahami bagaimana menghasilkan research paper yang terstruktur dengan baik, dapat dilaksanakan dan orisinal 6. Memahami bagaimana mempresentasikan konsep penelitian dengan jelas dan percaya diri



BAGIAN VII PEMBENTUKAN MATAKULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Mata kuliah relevan yang telah dihasilkan pada bagian sebelumnya, dipetakan ke dalam matakuliah yang menjadi kurikulum prodi S2 MIAP. Mata kuliah tersebut harus memiliki jaminan untuk sesuai dengan CPL dari prodi, untuk itu maka diperlukan matrik yang mengkaitkan antara mata kuliah dan CPL prodi. Berikut adalah matriks matakuliah dan CPL Prodi untuk masing masing mata kuliah.

Tabel 7. Matrik CPL dan Mata Kuliah Baru

No	Mata Kuliah	CPL			
		CPL1	CPL2	CPL3	CPL4
Mata Kuliah Wajib					
1	Matrikulasi	1.3	2.4	3.2	-
2	<i>Public Administration and Governance</i>	1.1; 1.2;	2.2; 2.4	3.1; 3.3;	4.4
3	Ekonomi untuk Kebijakan Publik	1.1; 1.2;	2.1; 2.4	3.2; 3.3;	4.4; 4.5
4	Kepemimpinan dan Inovasi Sektor Publik	1.1; 1.2;	2.1; 2.4	3.1; 3.4	4.1; 4.2;
5	Analisis Data Untuk Administrasi Publik	1.1	2.1; 2.2	3.3; 3.5	4.1; 4.2
6	Analisis Kebijakan Publik	1.3	2.1; 2.2	3.1; 3.4	4.2; 4.3; 4.5
7	Metode Penelitian Administrasi Publik	1.1	2.3; 2.4	3.3; 3.4	4.2; 4.3
8	Manajemen Risiko dan Audit Kinerja Sektor Publik	1.4	2.2; 2.3	3.1; 3.5	4.1; 4.2; 4.3
Mata Kuliah Konsentrasi					
1	Manajemen Sumber Daya Manusia	1.3	2.2; 2.3	3.1; 3.5	4.1; 4.3



2	Manajemen Keuangan	1.4	2.2; 2.3	3.1; 3.5	4.1; 4.3
3	Perencanaan Strategis	1.3	2.1; 2.4	3.2; 3.4	4.2; 4.5
4	Digital Governance	1.4	2.2; 2.3	3.3; 3.5	4.1; 4.2
5	Manajemen Smart City	1.3	2.1; 2.4	3.2; 3.4	4.1; 4.2
6	Proses Bisnis dan Layanan Publik Digital	1.4	2.1; 2.3	3.3; 3.5	4.1; 4.2
Mata Kuliah Pilihan					
1	Regulatory Impact Analysis	1.3	2.1; 2.3; 2.4	3.2; 3.3	4.3; 4.4; 4.5
2	Ekonomi Politik Pembangunan	1.4	2.1; 2.4	3.2; 3.4	4.2; 4.5
3	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	1.3	2.1; 2.2	3.2; 3.3; 3.4	4.2; 4.3; 4.5
4	Strategi Pembangunan	1.4	2.3; 2.4	3.2; 3.4	4.2; 4.4
5	Manajemen Bencana	1.3	2.1; 2.4	3.2; 3.4	4.2; 4.4
6	Internet Politics	1.4	2.3; 2.4	3.2; 3.4	4.1; 4.2
7	Mini Research	-	2.1; 2.3	3.3; 3.4	4.2;

**BAGIAN VIII MATRIKS DAN PETA KURIKULUM**

Struktur pembagian mata kuliah tiap semester untuk mahasiswa prodi S2 MIAP disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 8. Sebaran Mata Kuliah

Semester I (1 Mata Kuliah Matribulasi dan 7 Mata Kuliah Wajib): 24 SKS		
No	Mata Kuliah	SKS
1.	Matrikulasi	3
2.	<i>Public Administration and Governance</i>	3
3.	Ekonomi untuk Kebijakan Publik	3
4.	Kepemimpinan dan Inovasi Sektor Publik	3
5.	Analisis Data Untuk Administrasi Publik	3
6.	Analisis Kebijakan Publik	3
7.	Metode Penelitian Administrasi Publik	3
8.	Manajemen Risiko dan Audit Kinerja Sektor Publik	3
Semester II (3 Mata Konsentrasi, 3 Mata Kuliah Pilihan, dan Tesis): 21 SKS		
No	Mata Kuliah	SKS
1.	Mata Kuliah Konsentrasi	4
2.	Mata Kuliah Konsentrasi	4
3.	Mata Kuliah Konsentrasi	4
4.	Mata Kuliah Pilihan	3
5.	Mata Kuliah Pilihan	3
6.	Mata Kuliah Pilihan	3
Semester III: 12 sks		
No	Mata Kuliah	SKS
1.	Tesis*	12



Tabel 9. Daftar Mata Kuliah Konsentrasi

No	Konsentrasi	Mata Kuliah	SKS
1.	Tata Kelola Sektor Publik (<i>Public Governance</i>)	Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Sektor Publik	4
		Manajemen Keuangan Untuk Sektor Publik	4
		Perencanaan Strategis Untuk Sektor Publik	4
2.	Tata Kelola Pemerintahan Digital (<i>Digital Governance</i>)	<i>Digital Governance</i>	4
		Manajemen <i>Smart City</i>	4
		Bisnis proses dan Layanan Publik Digital	4

Catatan: Sesuai dengan ketentuan Akademik FISIPOL UGM bahwa kelas mata kuliah pilihan dan mata kuliah konsentrasi bisa terselenggara jika ada 8 mahasiswa yang memilih mata kuliah tersebut. Tawaran mata kuliah pilihan yang diberikan kepada para mahasiswa bisa berubah-ubah setiap tahun akademik dengan mengikuti perkembangan kebutuhan dan isu terkini dalam administrasi publik.

Tabel 10. Daftar Mata Kuliah Pilihan

No	Mata Kuliah	SKS
1.	Penilaian Dampak Regulasi (<i>Regulatory Impact Assessment</i>)	3
2.	Ekonomi Politik Pembangunan	3
3.	Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	3
4.	Strategi Pembangunan di Indonesia	3
5.	Manajemen Bencana	3
6.	Internet Politics and Public Policy	3
7.	Mini Research	3



Tabel 11. Daftar *Soft Skill* yang Ditawarkan

No	<i>Softskill</i>	SKS
1.	<i>Policy Brief</i>	0
2.	<i>Policy Paper</i>	
4.	Indikator Kinerja	



BAGIAN IX RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran selama satu semester. RPS digunakan sebagai panduan bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester terkait. Sehingga pelaksanaan perkuliahan dapat mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. RPS disusun oleh dosen pengampu, baik secara individu maupun kelompok, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di dalam jurusan. RPS dapat diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebuah RPS setidaknya memuat beberapa informasi sebagai berikut:

- Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah SKS, dan nama dosen pengampu;
- Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran;
- Bahan kajian yang relevan dengan kemampuan yang akan dicapai;
- Metode pembelajaran yang diterapkan;
- Waktu yang disediakan;
- Deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa selama satu semester;
- Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
- Daftar referensi yang digunakan.

Untuk menjamin konsistensi dan keseragaman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM telah membuat panduan RPS yang dapat menjadi acuan. Panduan RPS disajikan pada halaman berikutnya. Sementara RPS lengkap untuk seluruh mata kuliah terdapat pada lampiran dokumen ini.

Tabel 12. Format Rencana Pembelajaran Semester

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)		
MAP	NAMA MATA KULIAH	:
	KODE MATA KULIAH	:
	BOBOT SKS	:
	DOSEN PENGAMPU	:
	PRODI	: S3 Ilmu Administrasi Publik



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	CP LULUSAN (CPL)
	CPL 1
	CPL 2
	Dst.
	CP MATA KULIAH (CPMK) Disesuaikan pada Taksonomi Bloom tingkat S3
	CPMK 1
	CPMK 2
	Dst.
	SUB CP MATA KULIAH (SUB CPMK) Target masing-masing pertemuan
	SUB CPMK 1
	SUB CPMK 2
	SUB CPMK 3
	Dst.
DESKRIPSI SINGKAT MK	Berisi deskripsi singkat MK
REFERENSI	Referensi Pembelajaran



RPS yang telah disusun dilengkapi dengan Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (RKPM) dengan format sebagai berikut.

Tabel 13. Tabel Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (RPKM)

MINGGU KE-	SUB-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	BAHAN KAJIAN (Materi Ajar)	METODE PEMBELAJA RAN	WAKT U	MODALITAS PEMBELAJA RAN	KRITERIA PENILAIAN DAN INDIKATOR	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
Dst.							



BAGIAN X MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Pelaksanaan kurikulum di Program Studi dikelola oleh Pengelola Program Studi bersama dosen pengampu melalui penyusunan RPS, pengorganisasian perkuliahan, serta pemantauan ketercapaian capaian pembelajaran. Untuk menjamin mutu, proses ini diawasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Unit Penjaminan Mutu dan Reputasi UGM (SPMRU). AMI mencakup pemeriksaan dokumen RPS, observasi pelaksanaan pembelajaran, serta audiensi dengan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. [Hasil audit](#) menjadi dasar evaluasi kurikulum dan ditindaklanjuti melalui rapat program studi dan fakultas, termasuk penyesuaian materi ajar, metode pembelajaran, maupun penguatan capaian pembelajaran lulusan.